

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel komunikasi menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif bermakna antara variabel komunikasi dengan implemetasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke provinsi. Dilihat dari uji menggunakan *Spearman Rank* yang dihasilkan yakni 0,611 ** hal ini menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat dengan arah yang positif. Proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan telah mengantar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pengalihan kewenangan sekolah menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi. Hasil yang dicapai dari proses komunikasi terlihat dari terlaksananya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk berkaitan dengan dokumen atau data yang merujuk pada proses sosialisasi seperti daftar penerimaan ATK, Surat Keputusan (SK). Dengan demikian proses komunikasi Pengalihan Kewenangan Sekolah Menengah Atas ke Provinsi di Sumatera Barat sudah terlaksana dengan sesuai waktu yang telah ditentukan, pengalihan sekolah menengah atas tidak hanya dilakukan antar pelaksana kebijakan tetapi juga oleh kepala sekolah dan pihak yang dikenai secara langsung oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian untuk variabel sumberdaya menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif bermakna antara variabel sumber daya dengan

Implementasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke provinsi. Dilihat dari uji menggunakan *Spearman Rank* yang dihasilkan yakni 0,696 ** hal ini menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat dengan arah yang positif. Sumberdaya dalam penelitian ini dinilai sudah mencukupi dalam implementasi kebijakan ini. Sumber daya manusia secara kuantitas sudah mencukupi. Seperti sumber daya manusia secara kuantitas sudah mencukupi, sumber daya fasilitas yang meliputi sarana prasarana dirasa cukup, karena setiap sekolah sudah ada ruang pustaka, ruang labor, ruang kelas yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan, sumberdaya anggaran dinilai masih kurang bahwa anggaran daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih kurang sepenuhnya untuk mendanai pengelolaan sekolah menengah atas tersebut di seluruh kabupaten/kota.

Hasil penelitian hubungan yang bermakna antara sikap pelaksana dengan implelementasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke provinsi. Dilihat dari uji menggunakan *Spearman Rank* yang dihasilkan yakni 0,459**. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat dengan arah yang positif. sikap pelaksanaan dalam implementasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke provinsi di Sumatera Barat ditanggapi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara kecenderungan penerimaan dan sikap para pegawai dinas pendidikan terhadap kebijakan yang ada cenderung mendukung proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah atas di Sumatera Barat.

Hasil penelitian untuk variabel struktur birokrasi menunjukkan hubungan yang sedang dan berpola positif bermakna pula antara struktur birokrasi dengan

implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke provinsi. Dilihat dari uji menggunakan *Spearman Rank* yang dihasilkan yakni 0,449 **. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat dengan arah yang positif. Struktur birokrasi di Sumatera Barat dalam implementasi ini sudah berjalan dengan cukup baik.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan mutu implementasi kebijakan pengalihan kewenangan Sekolah Menengah Atas dari kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi Sumatera Barat

6.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini. Maka peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada Dinas Pendidikan Kota Padang, maupun kepada stakeholder terkait, berikut ini :

A. Saran Akademis

1. Kajian lebih lanjut diperlukan mengenai implementasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di Sumatera Barat. Karena, kajian tentang kebijakan pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah Atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dari perspektif kebijakan masih belum banyak dikaji.

2. Penelitian tentang implementasi kebijakan dari segi disposisi dan struktur birokrasi perlu untuk dikaji lebih lanjut, mengingat dalam kajian ini pembahasannya cukup terbatas.

B. Saran Praktis

1. Perlu ada komitmen pada semua elemen ataupun instansi terkait dalam menyikapi pelaksanaan pengalihan SMA atau SMK dengan baik.
2. Seharusnya para pejabat seperti para SKPD di kabupaten/kota serta SKPD Provinsi dan BKN duduk bersama mengadakan sosialisasi kepada guru dalam melaksanakan pengalihan Sekolah Menengah Atas.
3. Pihak pemerintah Provinsi agar segera membentuk UPT atau cabang dinas agar segala urusan guru tidak mengalami kesulitan karena jarak tempuh yang jauh.

